



Buku Seri
Sejarah Islam
Indonesia
Modern

Gerakan - Gerakan **ISLam** Indonesia Kontemporer

Editor: Muhammad Wildan



Editor: Muhammad Wildan



Gerakan - Gerakan ISLam Indonesia Kontemporer

**~Zuhroh Lathifah~Syamsul Arifin~ Mundzirin Yusuf ~Riswinarno~ Badrun~
~Dudung Abdurrahman~ Siti Maimunah ~Nurul Hak~ Musa~Machasin~
~Sujadi~Soraya Adnani~Muhammad Wildan~ Maharsi~Fatiyah~**



Gerakan-Gerakan
ISLam
Indonesia Kontemporer

Perpustakaan Nasional RI Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Buku Seri Sejarah Islam Indonesia Modern
GERAKAN-GERAKAN ISLAM INDONESIA KONTEMPORER

Copyright @ 2020 Penulis
@ Hak cipta Dilindungi oleh undang-undang
Memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit, adalah tindakan tidak bermoral
dan melawan hukum.

Buku Seri Sejarah Islam Indonesia Modern
GERAKAN-GERAKAN ISLAM INDONESIA KONTEMPORER

ISBN: 978-979-8548-12-3

Penulis : Zuhroh Lathifah, Syamsul Arifin, Mundzirin Yusuf,
Riswinarno, Badrun, Dudung Abdurrahman,
Siti Maimunah, Nurul Hak, Musa, Machasin, Sujadi,
Soraya Adnani, Muhammad Wildan, Maharsi, Fatiyah

Editor : Muhammad Wildan

Setting Layout : Tim Adab Press

Desain Cover : Tim Adab Press

Cetakan ke 1 : November 2020

Diterbitkan oleh



Adab Pres
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
Jl. Laksda Adisutjipto Yogyakarta Indonesia
Email: Adab_press@yahoo.co.id



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita, sehingga kita dapat menerbitkan buku seri Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam yakni Sejarah Islam Indonesia Modern.

Islam telah memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Islam Indonesia telah memberikan kontribusi positif tidak hanya dalam membangun negara-bangsa Indonesia, tapi juga mengisi kemerdekaan dengan nilai-nilai Islam yang positif. Sejak masa pergerakan, era Orde Lama, Orde Baru hingga era reformasi banyak sekali tokoh-tokoh Muslim Indonesia yang memainkan peran penting di ranah politik, sosial, maupun budaya Indonesia. Sejarah Umat Islam Indonesia khususnya gerakan-gerakan sosial-keagamaan mempunyai peranan besar dalam mewarnai dan mengubah perjalanan sejarah Indonesia.

Tulisan tentang sejarah Islam Indonesia sebetulnya sudah banyak. Namun tema gerakan-gerakan sosial-keagamaan ini juga ikut berkontribusi dalam merekam peran umat Islam baik untuk cerminan masa lalu ataupun menata masa depan. Proklamator Indonesia Bung Karno juga mengatakan “jangan sekali-kali melupakan sejarah”. Oleh karena itu penting sejarah Indonesia ditulis oleh orang Indonesia sendiri.

Penulisan sejarah dengan sudut pandang Indonesia sentris sudah lama dimulai, greget untuk maju harus terus ditingkatkan dan diwujudkan, sehingga melahirkan karya-karya baru. Hal ini akan mampu memupuk kesadaran sejarah Indonesia bagi generasi muda yang menjadi harapan masa depan. Penerus bangsa yang tidak tercerabut dari akar sejarahnya.



Sebagai bentuk kepedulian Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI) UIN Sunan Kalijaga, dengan ini kami menulis gerakan-gerakan Islam Indonesia modern dan kontemporer. Gerakan-gerakan itu telah berkontribusi signifikan dalam dinamika Islam Indonesia secara umum, dan Islam-politik Indonesia secara khusus. Diharapkan kumpulan tulisan dosen-dosen ini bisa memberikan tambahan referensi bagi mahasiswa sejarah yang tertarik di bidang kajian gerakan Islam Indonesia.

Tidak lupa ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua penulis yang telah bekerja keras demi terbitnya buku ini. Terakhir, kami berharap semoga penerbitan buku ini bermanfaat bagi semua civitas akademika Sejarah dan Kebudayaan Islam, dan khalayak umum pada saat ini maupun yang akan datang. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, November 2020

Editor

Muhammad Wildan



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
SAREKAT ISLAM PELOPOR GERAKAN KEBANGSAAN	1
A. Pendahuluan	1
B. Latar Belakang Lahirnya SDI	2
C. Ideologi dan Pemikiran	7
D. SI Menjadi Partai Politik.....	14
E. Perpecahan di Tubuh SI	16
F. SI pada Masa Reformasi	16
G Penutup.....	20
KONTRIBUSI MUHAMMADIYAH BAGI BANGSA INDONESIA	24
A. Pendahuluan	24
B. Latar Belakang didirikannya Muhammadiyah	25
C. Ideologi Muhammadiyah	29
D. Implementasi dan Respons Masyarakat	30
E. Kontribusi Muhammadiyah	33
F. Perkembangannya dan Respons Masyarakat.....	47
G. Muhammadiyah Dewasa Ini dan Kendalanya	45
H. Penutup.....	47
ISLAM, PEREMPUAN, DAN KEMANUSIAAN:	
‘Aisyiyah Sebagai Gerakan Sosial Baru di Awal Abad 21 ..	51
A. Pendahuluan	52



B. Kelahiran dan Perkembangan ‘Aisyiyah	53
C. Hati dan Jantung Pemikiran ‘Aisyiyah (Ideologi).....	55
D. Reformasi dan Langkah Baru Aisyiyah	69
REVITALISASI TRILOGI UKHUWAH NU DI ERA REFORMASI:	
Islamiyah, Wathaniyyah Dan Insaniyyah	77
A. Pendahuluan	78
B. NU dan Sejarah Pemikiran Trilogi Ukhwah.....	81
C. Trilogi Ukhwah: Pengejawantahan Ideologi NU	86
D. Respons Terhadap Persoalan Kontemporer.....	89
E. Penutup	96
DINAMIKA KONTEMPORER PERSATUAN ISLAM	
(PERSIS), 1945-2015	99
A. Pendahuluan	99
B. Pemikiran Keagamaan	100
C. Orientasi Sosial-politik	103
D. Pengembangan Pendidikan dan Dakwah	109
E. Kesimpulan	115
KIPRAH & PERGULATAN MUI DALAM PEMBANGUNAN	
INDONESIA (1975-2020).....	119
A. Pendahuluan	119
B. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)	120
C. Kiprah MUI di Indonesia	130
D. MUI dalam Sorotan	135
E. Penutup	140
AKAR IDEOLOGI DAN GERAKAN SOSIAL KEAGAMAAN	
MAJELIS TAFSIR AL-QUR’AN (MTA).....	144
A. Pendahuluan	144
B. Latar Belakang Berdirinya MTA	147



C. Struktur Organisasi, Kepengurusan dan Keanggotaan .	150
D. Profil Abdullah Thufail dan Genealogi Ideologi MTA..	152
E. Gerakan Sosial Keagamaan MTA	156
F. Kesimpulan.....	161
 HIZBUT TAHIRR INDONESIA: Bergerilya Di Antara Islam dan Islamisme.....	165
A. Pendahuluan	165
B. Latar Belakang Sejarah.....	166
C. Ideologi Keagamaan.....	172
D. Kiprah dan Dinamika Gerakan	176
E. Penutup	180
 AHMADIYAH DI INDONESIA.....	185
A. Pendahuluan	185
B. Tentang Berdirinya Ahmadiyah.....	186
C. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI).....	190
D. Ajaran Pokok Ahmadiyah	194
 DEWAN DAKWAH ISLAMIYAH INDONESIA: Berdakwah & Berpolitik Di Era Orde Baru Dan Reformasi	198
A. Pendahuluan 154	
B. Mengawal DDII.....	200
C. Aktivitas DDII pada Era Orba dan Reformasi	206
D. Epilog	217
 DINAMIKA IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM INDONESIA DALAM SEJARAH PERPOLITIKAN DI INDONESIA.....	225
A. Pendahuluan	225
B. Sejarah Berdirinya ICMI.....	227
C. Ideologi ICMI: Islam Kultural	230



D. Dinamika Organisasi (Internal)	236	
E. Gerakan Sosial Keagamaan	244	
F. Penutup	246	
PERJUANGAN KONSTITUSIONAL PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAN TANTANGAN ISLAMISME.....		248
A. Pendahuluan	248	
B. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera	249	
C. Dari Gerakan Dakwah ke Partai Politik	252	
D. PKS: Partai dan Gerakan Dakwah	256	
E. Ideologi PKS	257	
F. PKS, Demokrasi, dan Kebangsaan	261	
G. Antara Islamisme dan Post-Islamisme	262	
H. Dinamika dan Arah Gerakan PKS.....	264	
I. Penutup	267	
KARAKTERISTIK JAMAAH TABLIGH DI INDONESIA		270
A. Pendahuluan	270	
B. Sejarah Jamaah Tabligh	272	
C. Sistem Dakwah	278	
D. Kehidupan Sosial Kemasyarakatan	281	
E. Kehidupan Budaya.....	284	
F. Penutup	288	
MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA (MMI): SEJARAH, PEMIKIRAN, DAN GERAKAN		291
A. Pendahuluan	291	
B. Sejarah Berdiri.....	292	
C. Pemikiran	296	
D. Gerakan	300	
E. Penutup	303	



PERJUANGAN KEBANGSAAN & PENDIDIKAN AL-IRSYAD	307
A. Pendahuluan	307
B. Al-Irsyad Berdiri dan Berkembang	309
C. Al-Irsyad, dari Pendidikan ke Politik	317
D. Al-Irsyad Kembali Sebagai Gerakan Pendidikan.....	323
E. Penutup	325
 BIODATA PENULIS.....	328



SAREKAT ISLAM PELOPOR GERAKAN KEBANGSAAN

Zuhrotul Latifah

A. Pendahuluan

Sarekat Islam (SI) yang berakar dari Sarekat Dagang Islam (SDI) merupakan organisasi pelopor kebangkitan kesadaran nasional Indonesia. SDI ini didirikan oleh H. Samanhudi di Surakarta pada tahun 1905, ketika Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Sejalan dengan namanya, SDI bergerak di bidang ekonomi dan keagamaan yang berusaha membendung bangsa Tionghoa yang memonopoli perdagangan bahan batik. Pedagang-pedagang Tionghoa itu hak maupun status sosialnya lebih tinggi dari para pedagang dari kalangan bumiputera, dan usahanya lebih maju. Monopoli bahan batik oleh pedagang Tionghoa itu mendapat dukungan dari pemerintah kolonial Belanda sehingga merugikan rakyat pribumi. SDI dipandang membahayakan kedudukan Belanda karena berhasil menimbulkan kesadaran kebangsaan di kalangan kaum bumiputera sehingga pernah mendapat skors dari pemerintah.

Masuknya HOS Cokroaminoto ke dalam organisasi ini membuat perubahan besar pada nama dan sifatnya. SDI berubah menjadi Sarekat Islam (SI), gerakan dan keanggotaannya juga semakin luas. Bahkan SI merupakan organisasi politik pertama di Indonesia yang ingin mencapai kemerdekaan Indonesia. Gerakan politik SI menarik untuk diteliti mengingat SI sebagai pelopor gerakan politik



yang perkembangannya sangat cepat, melahirkan tokoh-tokoh besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan diwarnai dengan berbagai konflik. Gerakan politiknya ini kemudian menginspirasi organisasi-organisasi lain untuk berjuang dengan gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

B. Latar Belakang Lahirnya SDI

SDI pada awalnya merupakan organisasi pedagang-pedagang muslim yang dirintis H. Samanhudi di Lawean, Solo, Jawa Tengah, salah satu pusat kerajinan batik terkenal di Indonesia pada abad ke-19. Di Surakarta perusahaan batik berada di tangan orang-orang Jawa, Arab dan Cina. Ketika itu, pengusaha Jawa adalah yang terbanyak dengan tenaga kerja juga dari Jawa. Organisasi ini berdiri pada tanggal 16 Oktober 1905 M, bertepatan dengan 16 Sya'ban 1323 H (Suryanegara, 2013: 352; Anshori, 1981: 4). Di antara faktor-faktor yang mendorong lahirnya SDI adalah: adanya dominasi ekonomi terutama monopoli bahan-bahan batik oleh golongan Cina, gerakan kristenisasi oleh misi dan zending yang mendapat dukungan pemerintah kolonial Belanda dan adanya penghinaan-penghinaan terhadap Islam dan pemeluknya dari golongan kejawen yang berpusat di kraton Solo dan Yogyakarta (Djaelani, 1994: 84). Tujuan didirikannya SDI ini untuk mempersatukan pedagang-pedagang batik yang muslim agar bisa menyaingi pedagang-pedagang batik yang lebih besar dari Tionghoa.

Keberadaan SDI sebagai pelopor kebangkitan Nasional Indonesia belum bisa diterima oleh seluruh kalangan. Hal ini berkaitan dengan adanya perbedaan pandangan berkaitan dengan kategori pejuang di Indonesia antara nasionalis Islam dan nasionalis sekuler (Anshori, 1981: 4). Menurut Ansori, nasionalis Islam adalah mereka yang komitmen bahwa negara dan masyarakat diatur oleh Islam, sedangkan nasionalis sekuler adalah mereka yang beragama Islam, Kristen dan lain-lain yang berpegang pada pemisahan tegas antara negara dan agama. Perbedaan pandangan ini berawal dari “kapan” dikatakan sebagai awal kebangkitan nasional: Budi Utomo atau SDI? Nasionalis sekuler berpandangan bahwa awal perjuangan



untuk kemerdekaan Indonesia dimulai dengan lahirnya Budi utama (BU) pada tanggal 20 Mei 1908. Dari BU ini kemudian melahirkan gerakan-gerakan nasional sekuler yang lain yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Indonesia (Partindo), Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-baru), Partai Indonesia Raya (Parindra), dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Kalau diperhatikan keanggotaan BU terbatas di Jawa Tengah, pada awal berdirinya perhatiannya bukan untuk Indonesia secara keseluruhan dan hanya untuk kalangan kaum terpelajar dari kalangan bangsawan (Anshori, 1981: 4). Adapun kaum nasionalis Islami berpandangan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia bertumpu pada kelahiran SDI pada tanggal 16 Oktober 1905. Sejak berdirinya SDI diarahkan untuk rakyat jelata dengan lingkup yang lebih luas yaitu Indonesia. Secara berurutan, namanya berubah dari Syarikat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1912 berubah menjadi Sarekat Islam (SI), pada tahun 1923 berubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI), pada tahun 1927 berubah menjadi Partai Syarikat Islam Hindia Timur (PSIHT) dan pada tahun 1930 berubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSSI). (Anshori, 1981: 5-6). Dengan demikian, polarisasi perjuangan rakyat Indonesia sudah terjadi sejak awal abad ke-20. Kondisi inilah yang berpengaruh pada perbedaan tentang organisasi mana yang merupakan tonggak kebangkitan nasional Indonesia, dan awal kebangkitan nasional dimulai dari kelahiran SDI pada tahun 1905.

Tujuan didirikannya SDI pada awalnya adalah untuk menjadi wadah bagi pedagang-pedagang batik (muslim) agar dapat bersaing dan dapat membendung pedagang-pedagang Tionghoa di Indonesia (Romli, 2006: 40). Para pedagang Tionghoa ketika itu lebih sukses dan lebih maju usahanya karena mereka memiliki hak dan status sosial yang lebih tinggi daripada pribumi. Mereka menguasai jaringan perdagangan, bahan baku batik impor sekaligus pemasaran hasil produksi batik sehingga bisa mengendalikan harga batik (Wasino, 2006: 26). Sebagai bangsa yang punya modal, pedagang-pedagang Tionghoa mendominasi dan memonopoli bahan untuk memproduksi batik sehingga menyulitkan pedagang-pedagang pribumi yang modalnya lebih kecil. Pemerintah kolonial Belanda



memfasilitasi pedagang-pedagang Tionghoa sehingga mereka tidak hanya berdagang batik, tetapi juga sebagai pengusaha-pengusaha pembatikan seperti kain putih, saga dan lilin (Materu, 1985: 14). Mereka dapat menjual batik dengan harga lebih murah karena bahan-bahannya dibeli langsung dari importir bangsa Eropa. Adapun pedagang-pedagang pribumi menjual lebih mahal karena mereka mendapatkan bahan batik dari kelas menengah yang dikuasai orang-orang Tionghoa sehingga mereka mengalami kerugian (Yasmin, 2009: 24). Para pedagang Tionghoa yang kaya itu umumnya bersikap angkuh, superior dan mendominasi perdagangan batik kala itu. Kondisi ini sengaja diciptakan oleh pemerintah kolonial Belanda yang menempatkan mereka sebagai kelas ke dua dalam status sosial setelah golongan mereka sendiri, sedang kaum pribumi sebagai kelas terbawah di bawah kelas bangsa asing di negaranya sendiri. Kondisi ini menyadarkan kaum pribumi untuk bangkit melawan ketertindasan bangsa asing. Dengan demikian didirikannya SDI dimaksudkan untuk memajukan dan melindungi pedagang pribumi yang Muslim dari tekanan pedagang Tionghoa. Anggota SDI adalah para pedagang Muslim yang sanggup menegakkan panji-panji Islam (Hidayat, 2014: 190).

Di samping monopoli bahan-bahan batik oleh pedagang-pedagang Tionghoa, adanya gerakan kristenisasi oleh misi dan zending yang mendapat dukungan pemerintah kolonial Belanda juga menjadi pendorong berdirinya SDI. Bagi Belanda, Islam merupakan penghalang bagi kelangsungan kekuasaannya, sehingga kekuatan Islam harus ditekan. Di lain pihak, adanya penghinaan-penghinaan terhadap Islam dan pemeluknya dari golongan Kejawen yang berpusat di kraton Solo dan Yogyakarta juga menjadi pendorong kelahiran SDI. Di kota Yogyakarta dan Surakarta sifat kejawennya masih kuat sehingga kaum bangsawan masih menikmati kedudukan tinggi dalam pandangan masyarakat. Kaum bangsawan kraton di dua kota ini banyak yang kurang menghargai hak-hak rakyat biasa, sebagai contohnya rakyat biasa dilarang memakai kain batik tertentu, di jalan-jalan tertentu di suatu kota rakyat biasa tidak boleh naik kereta, keharusan melakukan penghormatan berlebihan kepada



atasan dengan sembah, jongkok, sila dan sebagainya (Amin, 1996: 25). SDI bermaksud mendobrak diskriminasi yang diterapkan kaum bangsawan terhadap rakyat biasa dengan menegakkan Islam yang memandang sama pada semua kalangan manusia.

SDI menjadikan agama Islam sebagai pengikat umat karena saat itu di Indonesia kata nasionalisme belum muncul dan belum dikenal. Islamlah yang menjadi pembeda antara penduduk pribumi dengan penjajah. Islam menjadi pembangkit dan penggerak nasionalisme Indonesia. Dengan Islam; kelompok, suku, etnik yang berbeda-beda dapat disatukan. Bahkan menurut Natsir, yang pertama-tama meretas jalan pergerakan politik bagi kemerdekaan Indonesia dan menyatukan bangsa adalah Islam (Noer, 1973: 260). Kemerdekaan Indonesia sangat berarti bagi kemerdekaan kaum muslimin dan Islam, sehingga kaidah-kaidah Islam dapat dilaksanakan untuk menyejahterakan kaum muslimin dan seluruh makhluk Allah. Dengan demikian, nasionalisme Indonesia dimulai dari kaum muslim dan Islam Indonesia identik dengan nasionalisme Indonesia (Noer, 1973: 260-261).

Inisiatif H. Samanhudi mendirikan SDI dapat menarik perhatian dari berbagai surat kabar lokal yang terbit di Hindia Belanda sehingga mendorong banyak umat Islam untuk menjadi anggota organisasi ini. Banyak pedagang batik di Surakarta menggabungkan diri ke dalam SDI guna menghadang pedagang-pedagang etnis China yang semakin angkuh. H. Samanhudi begitu berpengaruh di dalam organisasi ini, ia berhasil membentuk SDI sehingga dinilai membahayakan kedudukan Belanda. Menghadapi perkembangan yang membahayakan SDI ini maka Belanda melakukan upaya untuk membendung agar organisasi ini tidak semakin luas keanggotaannya. Bangsa Belanda tidak mendapatkan jalan untuk menekan SDI, di berbagai tempat sering terjadi perkelahian di antara pedagang-pedagang Jawa dengan pedagang China yang sulit dikendalikan. Adanya perkelahian dan persaingan di kalangan pedagang-pedagang Jawa dan pedagang-pedagang Cina sengaja diciptakan oleh bangsa Kolonial karena kondisi itu bisa menjadi alasan untuk menekan dan membatasi gerakan-gerakan SDI yang dari awal berdirinya dinilai



membahayakan kedudukan Belanda. Pada tanggal 12 Agustus 1912 akhirnya Belanda mengeluarkan pelarangan sementara SDI karena dianggap mengganggu ketertiban umum. SDI dilarang menerima anggota baru dan penggeledahan kediaman para aktivis SDI juga dilakukan. Setelah tidak ada bukti adanya ‘sesuatu’ yang dinilai membahayakan maka pemerintah kolonial mencabut pelarangan sementara SDI pada tanggal 26 Agustus 2012 dengan ketentuan anggota baru dari luar Solo tidak boleh diterima (Suryanegara, 2013: 364).

Pada bulan Agustus 1912, kaum buruh di Krapyak, Solo memang melakukan mogok kerja yang mengagetkan pemerintah kolonial. Waktu itu mayoritas kaum buruh sudah menjadi anggota SDI, sehingga Residen Solo melakukan skorsing terhadap SDI pada tanggal 12 Agustus 1912 (Marihandono, 2015: 4) karena menganggap yang menjadi dalang pemogokan itu anggota SDI. Dalam penggeledahan ternyata tidak ada bukti bahwa anggota SDI menjadi dalang pemogokan itu sehingga skorsing dicabut pada 26 Agustus 2012 (Pringgodigdo, 1986: 4-5).

Kekhawatiran Belanda atas perkembangan SDI Surakarta mendorongnya untuk membuat SDI tandingan di Bogor. Mereka menunjuk RM Tirtoadisoerjo untuk mendirikan SDI (Sarekat Dagang Islamiyah). SDI di Bogor ini didirikan pada tahun 1909 (Suryanegara, 2013: 355; Niel, 1984: 135). Belanda memandang bahwa untuk bisa menandingi SDI versi H. Samanhudi diperlukan orang yang berdarah pedagang, dapat mengelola media massa, dan dari kalangan bangsawan. RM Tirtoadisoerjo adalah pilihan paling tepat menurut Belanda, karena ia pengurus surat kabar *Medan Priyayi*, dan *Poetri Hindia* di Bandung dari keluarga bangsawan. Ayahnya seorang kolektor pajak bernama R. Ng H.M. Chan Tirtidipoera, sedang kakeknya adalah bupati Bojonegoro bernama R.M.T. Tirtonoto (Suryanegara, 2013: 357).

Adapun cara-cara yang ditempuh RM Adisoerja untuk menandingi SDI H. Samanhudi adalah:

1. Menjalin kerja sama di kalangan priayi, bupati, perempuan dan pedagang China

2. Mencari dukungan dari kalangan pejabat kolonial Belanda seperti kontrolir dan Asisten Residen
3. Meminta perlindungan dan kucuran dana dari para bupati atau pejabat yang lain
4. Meminta bantuan kepada Sri Ratoe Wihelmina untuk mengembangkan surat kabar *Poetra Hindia* yang dipimpinnya (Suryanegara, 2013, 357).

Cara-cara yang ditempuh Sarekat Dagang Islamiyah yang demikian menggambarkan betapa dekatnya dengan pemerintah kolonial. Bantuan dana dan perlindungan yang diminta dari mereka itu tidak gratis, mereka menginginkan imbalan yaitu agar dibantu jangan sampai SDI di Surakarta itu mengganggu kekuasaan Belanda di Indonesia.

Adanya tekanan dari luar, termasuk dibentuknya SDI tandingan tidak menyurutkan perkembangan SDI Surakarta. SDI ini semakin meluas keanggotaannya, tidak terbatas pada kaum pedagang, kaum buruh, kaum petani, tetapi juga merambah kaum terpelajar. Pada tahun 1911, SDI sudah menjalar ke Surabaya dan bisa menarik banyak anggota, termasuk HOS Cokroaminoto, seorang bangsawan terpelajar dengan pendidikan model Belanda. Ia merupakan putra wedana Kletjo (Madiun) yang bernama R.M. Tjokroamiseno. Kakeknya yang bernama R.M. Adipati Tjokronegoro juga pernah menjabat sebagai bupati Ponorogo. HOS Cokroaminoto yang bergaris bangsawan juga bergaris santri karena kakeknya yang bernama Kyai Hasan Besari (Hasan Basri) merupakan pengasuh pondok pesantren di Tegalsari, Ponorogo. Kyai Hasan Besari ini diambil menantu Susuhunan ke II kesultanan Surakarta (Gonggong, 1985:7). HOS Cokroaminoto bersama Hasan Ali Soerati, saudagar Islam kaya dari India secara resmi masuk ke dalam SDI.

C. Ideologi dan Pemikiran

Masuknya HOS Cokroaminoto ke dalam SDI diawali oleh ajakan pengurus SDI Surakarta. Ajakan itu diterima setelah mempertimbangkan bahwa rakyat ketika itu tidak mengenal istilah kebangsaan, nasionalisme atau tanah air. Islam yang dijadikan



landasan perjuangan SDI menurut HOS Cokroaminoto sangat cocok dengan situasi saat itu. Islam menjadi pembeda antara pribumi dengan bangsa asing, Islam menjadi pemersatu umat untuk melawan semua penghinaan terhadap rakyat bumiputra. Sebelumnya ia merupakan tokoh dari kalangan kaum terpelajar yang aktif memperjuangkan cita-cita untuk memajukan rakyat pribumi.

Masuknya HOS Cokroaminoto ke dalam SDI memberikan makna tersendiri, di bawah kepemimpinannya, sejak 1912 Sarekat Islam menampakkan diri sebagai partai politik (Karim, 1983: 19). Mengawali perannya di dalam SDI, Cokroaminoto menyusun anggaran dasar yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan perjuangannya, ia membagi tahap perjuangan sebagai berikut:

1. Mengusir penjajah dari Indonesia dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia
2. Menjadikan Islam sebagai satu-satunya sistem dalam Negara Islam Indonesia yang merdeka.
3. Membentuk struktur pemerintahan yang memberlakukan hukum Islam di kerajaan Allah di muka bumi (*khalifah fil ardhi*) dengan mewujudkan kemerdekaan di seluruh dunia. (Solahudin, 2011: 53-56)

Setelah itu, HOS Cokroaminoto mengubah nama SDI menjadi Sarekat Islam (SI). Perubahan nama dengan menghilangkan kata “Dagang” dimaksudkan untuk lebih memperkokoh tujuan dan sasaran gerakan organisasi yang tidak sebatas di bidang ekonomi dan keagamaan, tetapi lebih luas lagi yaitu bidang politik, sosial, kultural dan keagamaan. Keanggotaan organisasi juga diperluas tidak sebatas para pedagang muslim, tetapi seluruh umat Islam dari berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Kepemimpinan organisasi juga berubah dari kelompok borjuis pribumi ke kaum terpelajar produk pendidikan barat. HOS Cokroaminoto telah mengubah konsep pergerakan organisasi dari bidang ekonomi ke bidang sosial politik (Ma’arif, 1985: 79) yang berwawasan nasional. Pada masa modern ini, HOS Cokroaminoto merupakan tokoh pertama di Indonesia dari golongan Islam yang berpandangan bahwa faktor pengikat

bagi rakyat Indonesia untuk menuju kemerdekaan yang sempurna adalah Islam (Smith, 1963: 28). SI merupakan organisasi pergerakan yang berdasarkan Islam dengan mengedepankan kepentingan kebangsaan. SI mengutamakan persatuan untuk mewujudkan suatu bangsa, sehingga ketika ada upaya pihak luar untuk mempropagandakan paham yang bertentangan dengan Islam dan kebangsaan itu sendiri ditolak oleh tokoh-tokoh SI (Winarni dan Widuatie, 2015: 217) .

Sebagai kaum terpelajar yang berdarah bangsawan, seharusnya HOS Cokroaminoto lebih memilih Budi Utomo dalam berorganisasi, tetapi ia lebih memihak pada kesantrian yang diwarisi dari buyutnya: Kyai Kasan Besari, pengasuh pondok pesantren di desa Tegalsari, Madiun, Jawa Timur. Menurut Akhdiat, Cokroaminoto tidak memilih berkiprah di BU karena terbentur oleh sikap konservatif kalangan priayi di Surabaya, padahal waktu itu ia sebagai ketua BU di sana (Achdian, 2017: 47). Ia memilih Islam sebagai dasar dalam membangkitkan semangat perjuangan di kalangan masyarakat luas. Menurut Azyumardi Azra, SI merupakan organisasi kebangsaan pertama dan menjadi awal kebangkitan nasional. Hal yang menjadi alasan bagi Azra ada 4 hal: pertama, anggota dan pimpinan organisasi mencakup berbagai suku di Indonesia, ke dua, penyebarannya melampaui berbagai pulau, ke tiga program yang diusung memperjuangkan kemerdekaan Nusantara dan ke empat status sosial pemimpin dan anggotanya sangat beragam dari priayi, abangan, petani, buruh maupun kaum yang tertindas. (Subekti, 2014: xii). Hal ini diperkuat oleh George McTurner Kahin bahwa SI merupakan pelopor kebangkitan nasional Indonesia di bidang politik. Diawali SI ini kemudian lahir tiga organisasi politik yang sangat berperan di Indonesia, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin Soekarno, Partai Komunis Indonesia yang dipimpin Semaun, dan Darul Islam yang dipimpin Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo (Subekti, 2014: 3).

Setelah SDI diubah menjadi SI, Cokroaminoto juga memperluas tujuan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar tanggal 10 September 1912 sebagai berikut:



1. Memajukan perdagangan
2. Menolong anggota yang kesulitan hidupnya dengan mendirikan koperasi
3. Memajukan kepentingan penduduk asli baik jasmani maupun rohani
4. Memajukan agama Islam (Rusli Karim, 1983: 19).

Sebagai anggota baru di dalam SI, karier Cokroaminoto sangat cepat. Kariernya diawali dari ketua cabang SI di Surabaya, kemudian menjadi wakil ketua SI yang ditetapkan pada tanggal 14 September 1912 dengan ketua H. Samanhudi. Dari Surabaya ini, SI cepat meluas hampir di seluruh Jawa Timur. Sejak awal berdirinya di Surabaya sampai pertengahan November 1912, SI telah memiliki 3000 anggota dan terus bertambah. Pada tahun 1913, SI Surabaya telah memiliki 6000 anggota (Achdian, 2017: 48), suatu perkembangan yang sangat pesat. Hal ini bertentangan dengan kebijakan Residen Surakarta yang begitu khawatir akan perkembangan SI sehingga melarang SI menerima anggota baru.

Setelah perubahan nama dari SDI ke SI, selanjutnya SI menyelenggarakan kongresnya yang pertama di Surabaya pada tanggal 26 Januari '1913. Kongres yang diselenggarakan di depan gedung *Oetoesan Hindia* itu dihadiri puluhan ribu pengunjung. Dalam pidatonya HOS Cokroaminoto menyampaikan pentingnya persatuan umat dalam ikatan agama (Gonggong, 1985: 33). Ia juga menyampaikan bahwa tujuan didirikannya SI untuk menciptakan kesejahteraan dan membela kepentingan rakyat (Marihandono, 2015: 8) dengan memajukan perdagangan bangsa Indonesia, membantu anggota yang kesulitan terutama di bidang ekonomi, dan memajukan kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Pada kongres pertama itu H. Samanhudi ditetapkan sebagai ketua pengurus Besar Sarekat Islam, HOS Cokroaminoto sebagai komisaris, memutuskan untuk tetap setia kepada pemerintah dan tidak sebagai partai politik (Marihandono, 2015: 9). Kongres juga merencanakan kongres berikutnya di Solo pada bulan Maret 1913.

Pada kongres di Solo ditetapkan bahwa SI adalah organisasi yang terbuka untuk umat Islam Indonesia. Dalam usaha menjaga agar



tetap sebagai organisasi rakyat maka pegawai pemerintah tidak boleh menjadi anggota SI (Yasmin, 2009: 27). Pengurus SI, lebih-lebih ketua dan wakilnya harus orang pribumi. Pembatasan ini tidak menjadi penghalang bagi tersebarnya SI ke seluruh Jawa dan luar Jawa karena Islam yang dijadikan asas perjuangan organisasi tidak menghalangi perbedaan ras maupun suku bangsa.

Semakin membesarnya keanggotaan SI membuat kekhawatiran pemerintah Hindia Belanda, sehingga saat pengurus SI mengajukan badan hukum pada 30 Juni 1913 kepada gubernur jendral Idenburg tidak dikabulkan. Pemerintah hanya memberikan badan hukum bagi SI lokal dengan tujuan untuk memecah belah kekuatan SI pada Maret 1914 (Ma'arif, 1985: 26). Pengakuan yang hanya untuk SI lokal telah memberikan peluang kepada SI untuk mengembangkan dirinya ke berbagai bidang kegiatan di luar ekonomi. Orientasi kegiatan organisasi untuk kepentingan agama, bangsa dan negara.

Tokoh-tokoh SI menjawab upaya pemerintah Kolonial untuk memecah belah SI dengan mendirikan satu wadah yang akan mengoordinir SI lokal dengan Central Syarekat Islam (CSI) pada 1915 di Surabaya (Gonggong, 1985: 35). Waktu itu sudah ada sekitar 50 cabang SI dengan tiga juta anggota (Kementerian Penerangan RI, 1951: 33). Rapat pengurus SI Pusat/ Central Sarekat Islam (CSI) menetapkan HOS Cokroaminoto, pimpinan *Oetoesan Hindia* di Surabaya sebagai ketua.

Kongres ke tiga SI diselenggarakan di Bandung pada 17-24 Juni 1916. Kongres ini merupakan kongres nasional pertama SI yang dihadiri hampir seluruh cabang SI dari Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi. Kongres ini merupakan kejadian pertama dalam perjuangan politik di Indonesia yang menggambarkan bahwa SI sudah menyebar ke berbagai pulau dalam menyatakan cita-cita nasional dengan Islam sebagai asas perjuangan. Dari kongres nasional ini, perjuangan untuk mendapatkan badan hukum terus diupayakan. Kegigihan itu membawa hasil, Gubernur Jenderal Idenburg pada 18 Maret 1916 memberikan badan hukum bagi CSI dengan wilayah seluruh Hindia Belanda (Prasetyo, 2014: 16). Pemerintah memberikan badan hukum kepada CSI itu sebagai alat kontrol agar bila ada cabang



SI yang melakukan keributan ada suatu badan yang bertanggung jawab (Notoprodjo, 1968: 25). CSI yang berpusat di Surabaya itu diketuai oleh HOS Cokroaminoto.

Di gedung Concordia yang sekarang disebut Gedung Merdeka di jalan Asia Afrika Bandung ini HOS Cokroaminoto bersama H. Agus Salim, Abdoel Moeis, Wignjadinstra menuntut kemerdekaan Indonesia dengan pemerintahan sendiri (Suryanegara, 2013: 391). Munculnya tokoh-tokoh baru di dalam SI dengan segala pemikiran yang disumbangkannya memberikan pemahaman Islam terhadap anggota-anggotanya. Dengan demikian SI berperan menumbuhkan kesadaran umat terhadap agamanya serta menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan umat Islam.

Kongres nasional SI yang ke dua diadakan di Batavia pada 20 sampai 27 Oktober 1917. Kongres menuntut berdirinya dewan-dewan daerah dan perluasan hak Volksraad menjadi lembaga legislatif yang sesungguhnya. HOS Cokroaminoto yang mengusulkan dibentuknya parlemen disetujui pemerintah yang pada 18 Mei 1918 membentuk Dewan Rakyat (Volksraad) dan HOS Cokroaminoto dan Abdul Muis sebagai wakil SI (Prasetyo, 2014: 19). Dua tokoh ini begitu tegas memberikan reaksi terhadap pemerintah sehingga sebagai oposisi. Mosi Cokroaminoto dan Abdul Muis agar anggota dewan dipilih dari dan oleh rakyat, membentuk pemerintah yang bertanggung jawab kepada parlemen yang ditolak pemerintah mendorong mereka keluar dari Volksraad (Amelz, 1952: 157). Dalam realitasnya Volksraad hanya sebagai penasihat pemerintah kolonial Belanda, bukan sebagai badan legislatif yang bertugas membuat undang-undang.

Masuknya SI ke dalam Volksraad menjadi pintu perpecahan SI yang diawali oleh infiltrasi tokoh-tokoh berideologi komunis. Semaun, Alimin Prawirodirdjo dan Darsono adalah murid-murid H.J.F. Sneevliet (berkebangsaan Belanda beraliran Marxis) adalah pengurus cabang SI Semarang. Semarang dipilih sebagai pusat menyebarkan benih Marxis karena kota ini terdapat banyak kaum buruh kereta api, posisinya di tengah-tengah antara kota-kota bengkel kereta api (Bandung, Madiun dan Surabaya), dan Semarang

dijadikan sebagai pemutus hubungan politik SI Surabaya dan Bandung yang secara otomatis diharapkan dapat melumpuhkan SI Yogyakarta dan Jawa Tengah (Suryanegara, 2013, 412). Sneevliet mendirikan *Indische Sociaal Demokratische Vereniging* (ISDV), partai politik berpaham sosialis pada tanggal 9 Mei 1914 berpusat di Semarang (Marihandono, 1915: 71). Abdul Muis berpandangan akan perlunya keikutsertaan SI ke dalam Volksraad sebagai ajang berlatih tentang masalah politik, sedangkan Semaun berseberangan karena berpendapat Volksraad hanyalah alat kaum kapitalis untuk mendapatkan keuntungan berlipat (Usman, 2017: 52). Waktu itu, Semaun sebagai ketua SI Semarang dan juga sebagai ketua ISDV. Di pihak lain, Gubernur Jendral Idenburg telah memberikan peluang kepada ideologi radikal (Marxisme) untuk melakukan infiltrasi ke dalam SI melalui cabang-cabang di daerah (Nour, 1983: 137). ISDV sendiri tanggal 23 Mei 1920 berubah menjadi Perserikatan Komunis India (PKI) dengan Semaun sebagai ketua dan Darsono sebagai wakil (Winarni dan Widuatie, 2015: 227).

Beberapa aktivis ISDV dari pribumi sudah bergerak aktif di SI dengan tujuan mencari dukungan di kalangan rakyat banyak. Target yang diinginkan adalah agar kepercayaan rakyat terhadap SI berkurang. Mereka berhasil mengguncang

SI melalui Indie Werbar, perburuhan dan Volksraad. Belanda memang memanfaatkan ISDV untuk memecah belah SI karena perkembangannya yang pesat sangat membahayakan Belanda. Berdirinya PKI di Semarang yang sengaja dikondisikan Belanda, diawali dengan menangkap para pemimpin SI terlebih dahulu seperti HOS Cokroaminoto, Abdul Moeis dan Sosrokardono (Suryanegara, 2013: 415). Dengan penangkapan tokoh-tokoh itu maka memungkinkan berdirinya PKI di dalam tubuh SI.

Infiltrasi kelompok Marxis membuat SI semakin kacau karena di ambang perpecahan. H. Agus Salim, Abdul Moeis dan Soetjopranoto menginginkan agar orang-orang yang berhaluan komunis disingkirkan dari SI (Usman, 2017: 53) guna memperkuat partai. Semaun berpendapat bahwa PKI itu dapat mempersatukan rakyat secara keseluruhan baik muslim atau non muslim, orang-



orang komunis telah mengubah SI dari kapitalis menjadi partai untuk rakyat sehingga pemikiran menyingkirkan kaum komunis dari SI tidak diperlukan (Noer, 1983: 140). Apa yang disampaikan Semaun tidak membawa hasil. Pada kongres SI di Surabaya pada 1921 disiplin partai kubu Agus Salim – Abdul Moeis didukung oleh banyak anggota dengan perbandingan 27:7 suara. Yang menjadi penentang kubu ini adalah SI Semarang, Solo, Salatiga, Sukabumi dan Bandung (Usman, 2017: 53). Akhirnya SI pecah menjadi dua yaitu SI putih dan SI Merah. SI Putih adalah mereka yang masih setia pada kepimpinan HOS. Cokroaminoto - Haji Agus Salim, dan Sarekat Islam Merah adalah mereka yang mengikuti Semaun dan Darsono. SI Merah ini telah mengganti nama organisasinya dengan Sarekat Rakyat di bawah PKI.

D. SI Menjadi Partai Politik

Pada saat kongres SI di Madiun 17 sampai 20 Februari 1923, HOS Cokroaminoto memelopori perubahan nama Central Syarikat Islam menjadi Partai Syarikat Islam agar lebih pasti dalam mencapai tujuan. Perubahan nama ini menunjukkan bahwa SI merupakan pelopor berdirinya partai politik di kalangan pribumi. Kongres semakin mantap menerapkan disiplin partai dan mengambil sikap perjuangan non kooperatif dalam menghadapi penjajahan Belanda (Suryanegara, 2013: 386; cf Amelz, 1952: 157). Kelompok Semaun dan Darsono yang lebih memilih bertahan di Perserikatan Komunis Hindia pada bulan Maret 1923 juga menyelenggarakan kongres di Bandung dan mengganti SI Merah menjadi Sarekat Rakyat (Anshoriy Ch., 2008:108). Dalam kongres di Bandung ini Semaun yang menjalin hubungan baik dengan Stalin di Moskow ini (Wiradipraja, 2005: 47) melakukan serangan-serangan kepada Partai Sarekat Islam. Sarekat Rakyat ini kemudian pada tahun 1924 berubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Kekecewaan PSI terhadap pemerintah kolonial Belanda dan golongan Komunis mendorongnya untuk mengubah strategi perjuangan dari kooperatif menjadi non kooperatif berdasarkan pada gerakan Pan Islam (Shiraishi, 1997:326). Dalam rangka

membangun kekuatan Islam di kalangan pribumi, melalui kongres al Islam PSI mengajak organisasi Islam seperti Muhammadiyah untuk menyatukan kekuatan dengan umat Islam dunia dalam kepemimpinan khalifah (Maftuhin, Sumarjono, Umamah, 2017: 247) . Selain itu, PSI juga berusaha untuk menjalin hubungan dengan Liga menentang penjajah, menyelenggarakan kursus tentang nasionalisme dan sosialisme Islam guna menentang Belanda. Apa yang dilakukan PSI itu mendapat tekanan pemerintah Belanda. Mereka mengancam PSI di dalam Volksraad, banyak pemimpin PSI daerah ditangkap, dan menggagalkan usaha PSI menjalin hubungan dengan Liga menentang penjajah. Dengan adanya tekanan-tekanan yang berat itu berakibat pada kegagalan perjuangan PSI melalui gerakan Pan Islam.

PSI tidak putus asa dalam berjuang, gagal dalam satu gerakan mendorongnya untuk mencoba jalan lain untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1927, PSI menggabungkan diri dengan kelompok nasionalis dalam wadah Permuafakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Indonesia (PPPKI) (Suwondo, 1977: 146). Di dalam PPPKI ini PSI juga mendapat hambatan, baik dari pemerintah maupun dari sesama anggota. Perbedaan pandangan di antara anggota, kritik dan penghinaan kaum nasionalis yang ditujukan kepada PSI mendorong PSI mengubah namanya menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) pada tahun 1929 dan memutuskan keluar dari PPPKI (Inglison, 1988: 143-146). Penambahan kata Indonesia pada partai itu diharapkan dapat memperluas kepentingan politik partai.

Ketika SI menjadi partai politik dengan nama Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), SI merupakan partai yang besar dan mempunyai tokoh-tokoh terkemuka. HOS Cokroaminoto, Haji Agus Salim, Abdul Moeis, Muhammad Roem, Arudji Kartawinata, Anwar Cokroaminoto, Harsono Cokroaminoto, Abu Hanifah adalah contoh tokoh-tokoh penting dari PSII (Singka, 2014: 2). Hampir dalam setiap periode perjuangan di Indonesia tokoh-tokoh PSII berkontribusi bagi kebaikan Indonesia. Dalam periode Demokrasi Parlementer PSII mengikuti pemilu berhadapan dengan Partai Komunis Indonesia, dalam Demokrasi Terpimpin PSII mempertahankan dirinya



berhadapan dengan pemerintah yang menjalankan demokrasi berkaki empat. Selanjutnya pada masa Orde Baru PSII mendapatkan tantangan hebat berkaitan dengan upaya pemerintah untuk restrukturisasi sistem kepartaian (Subekti, 2014: 3) dan berakhir dengan fusinya PSII ke dalam Partai Persatuan Pembangunan tahun 1973.

E. Perpecahan di Tubuh SI

Kebesaran SI sebagai organisasi nasional di bidang politik tidak dapat dipertahankan akibat adanya perpecahan dari dalam. Perpecahan ini ada kalanya disebabkan oleh perbedaan paham ideologi atau persaingan pengaruh bahkan karena masalah pribadi. Perpecahan SI diawali dari berkembangnya paham Marxisme di kalangan SI Cabang Semarang yang berakibat SI terpecah menjadi dua: SI Merah (Komunis) dan SI Putih (Islam) sehingga SI menurun. Semaun dan Darsono harus keluar dari SI berkaitan dengan disiplin partai yang ditetapkan pada kongres SI di Madiun pada tahun 1923. Di dalam kongres itu juga disepakati perubahan nama SI menjadi Partai Syarikat Islam (PSI). Selanjutnya SI Putih di bawah kepemimpinan HOS Cokroaminoto berupaya menghimpun kembali kekuatan Islam Indonesia dengan Pan Islamisme (Yasmin, 2009: 29). HOS Cokroaminoto dan H. Agus Salim yang memimpin kongres al-Islam pertama di Cirebon itu membahas tentang masalah furu' dan perbedaan-perbedaannya serta berupaya mewujudkan kerja sama di antara kaum muslimin.

Pada kongres-kongres al-Islam di Garut maupun di Surabaya Agus Salim menegaskan tentang pentingnya persatuan di kalangan umat Islam di Surabaya. Kongres al-Islam dan kongres SI pernah diadakan secara bersama di Yogyakarta pada tahun 1925. Dalam kongres itu HOS Cokroaminoto mengusulkan agar kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat diatur berdasarkan asas Islam. Usulan ini melahirkan pertentangan dan berlanjut pada perpecahan di tubuh SI antara kelompok HOS Cokroaminoto-H. Agus Salim dengan kelompok Sukiman-Suryopranoto. Kelompok HOS Cokroaminoto-H. Agus Salim menghendaki asas keagamaan, sedangkan kelompok Sukiman-Suryopranoto menghendaki asas



kebangsaan. Pertentangan ini semakin meruncing dan berakibat Dr. Sukiman pada tahun 1923 mendirikan Partai Islam Indonesia (PII) (Hanifah, 1978: 79). Selanjutnya pada tahun 1938 Sukiman, Kasman Singodimejo, Abdul Kahar Muzakar, Wibowo, Farid Ma'ruf, dan Mas Mansyur keluar dari SI. Kondisi ini semakin memperlemah kekuatan SI.

HOS Cokroaminoto yang wafat pada tahun 1934, kepemimpinannya digantikan oleh H. Agus Salim, pamor PSII kian menurun. Menurut H. Agus Salim menurunnya PSII ini karena sikap politik partai terhadap pemerintah yang non-kooperatif itu salah. Sikap itu harus diubah menjadi kooperatif demi kelangsungan partai (Sitorus, 1951: 25). Usulan itu mendorong pertikaian dan berakhir dengan H. Agus Salim yang mengundurkan diri dari kongres, kemudian mendirikan Barisan Penyedar Partai Syarikat Islam Indonesia pada 28 November 1936. Abikusno Cokrosuyoso yang terpilih sebagai pengganti pemimpin PSII sangat marah atas apa yang dilakukan H. Agus Salim itu kemudian memecatnya dari PSII. Pada tahun 1939 Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo juga dipecat dari PSII dan kemudian mendirikan partai politik PSII juga.

Pada awal kemerdekaan Indonesia PSII merupakan salah satu unsur dari Partai Masyumi yang merupakan satu-satunya partai Islam saat itu. Akan tetapi pada 1947 PSII memilih keluar dari Partai Masyumi dan berdiri sebagai partai politik. Pada bulan Juli 1947 PSII menyatakan diri keluar dari Masyumi dan mengembalikan SI kepada posisi partai yang berdiri sendiri. Alasan keluarnya PSII dari Masyumi karena adanya tawaran duduk di kabinet Amir Syarifuddin tetapi dewan pimpinan Masyumi menolaknya, padahal menurut Amir untuk membentuk kabinet yang kuat harus mengikutsertakan golongan Islam. Ketika itu, SI lebih memilih masuk ke dalam kabinet Amir daripada bertahan di Partai Masyumi sehingga ini memang melemahkan partai. Wakil PSII yang duduk dalam kabinet Amir Syarifuddin adalah Wondoamiseno sebagai menteri dalam negeri, Sjahbudin Latief sebagai menteri muda penerangan, Arudji Kartawinata sebagai menteri muda I pertahanan



dan Surowijono sebagai menteri muda pengajaran, pendidikan dan kebudayaan (Kementerian Penerangan, 1945: 431). Dari sudut persatuan umat, sikap PSII ini dikecam, tetapi dari sudut politik yang senantiasa mementingkan golongan sikap ini adalah wajar. Keluarnya PSII dari Masyumi ini menunjukkan kurangnya komitmen persatuan di kalangan tokoh pendukung Masyumi.

Di dalam tubuh PSII, sejak tahun 1945 bahkan sampai sekarang terjadi berulang kali pertikaian dan perpecahan. Pada tahun 1953 Abikusno Cokrosujoso dan pengikutnya yang dikeluarkan dari PSII, kemudian mendirikan PSII baru dengan nama PSII Abikusno. Pada tahun 1966 Syeh Marhaban mengambil alih kekuasaan Lajnah Tanfidhiyah PSII. Selanjutnya pada kongres PSII di Majaya tahun 1972 yang menghasilkan kepemimpinan PSII, diperebutkan oleh kelompok Gobel dan kawan-kawannya. Yang terakhir pada tahun 1983 kekuasaan Gobel diambil alih oleh Syarifudin Harahap (Subekti, 2014: 4). Perebutan kepemimpinan di dalam PSII terus berkelanjutan dan tidak ada penyelesaian. Kondisi ini berpengaruh pada hubungan yang rapuh antara para pemimpin PSII dengan para pendukungnya sehingga jumlah kader dan pendukungnya terus mengalami penurunan. Pada tahun 1973 PSII harus menerima kenyataan pahit karena harus fusi partai ke dalam Partai Persatuan Pembangunan.

F. SI pada Masa Reformasi

Pada tahun 1973 PSII bersama-sama dengan Partai NU, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) fusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan. Konsekwensi dari fusinya PSII ke dalam Partai Persatuan Pembangunan ini masih terasa sampai sekarang. Dalam konteks politik nasional perannya semakin menurun karena PSII bukan lagi sebagai partai yang berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari Partai Persatuan Pembangunan. Sebagaimana NU dan Muhammadiyah selanjutnya PSII juga menyatakan diri sebagai organisasi kemasyarakatan (omas) (Subekti, 2014,xix).

Di era Reformasi ini Sarekat Islam lebih banyak berperan sebagai ormas dan belum terlihat tanda-tanda kebangkitannya sebagai partai politik. Pada pemilu 1999 SI termasuk dalam 13 partai Islam yang dengan tegas menjadikan Islam sebagai dasar ideologinya ikut meramaikan pesta demokrasi itu. Partai-partai itu adalah Partai Keadilan (PK), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Nahdlatul Ulama, Partai Umat Islam (PUI), Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Kebangkitan Muslim Indonesia (KAMI), Partai persatuan (PP), Partai Masyumi Baru (PMB), Partai Politik Islam Indonesia Masyumi (PPIIM), Partai Abul Yatama (PAY), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1905, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dengan demikian partai Islam yang berasal dari SI ada dua yaitu PSII dan PSII 1905. Dalam penghitungan suara diperoleh hasil hanya tujuh partai yang memperoleh kursi di parlemen yaitu PPP, PK, PBB, PNU, PKU, PPIIM, PSII dan PP (Kamaruzzaman, 2003, 83).

Di lain pihak, ada partai politik yang berasas Pancasila dengan menggunakan simbol-simbol Islam. Partai-partai itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Cinta Damai (PCD), Partai Indonesia Damai (PID), Partai Indonesia Baru (PIB), Partai Solidaritas Uni Indonesia (SUNI), dan Partai Umat Muslimin Indonesia PUMI). Pada pemilu ini Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 51 kursi dan Partai Amanat Nasional mendapatkan 34 kursi (Kamaruzzaman, 2003, 83).

Pada Pemilu 2004 diberlakukan sistem *electoral threshold* sebesar 3 % perolehan suara pada Pemilu 1999. Sebagai partai yang gagal melewati *electoral threshold* maka Partai Syarekat Islam Indonesia dan Partai Syarekat Islam Indonesia 1905 tidak dapat mengikuti Pemilu 2004. Pada Pemilu 2009 diberlakukan ketentuan bahwa *electoral threshold* pada Pemilu sebelumnya tidak berlaku lagi dan digantikan *parliamentary threshold* sebesar dua setengah presen. Oleh karena Partai Syarekat Islam Indonesia dan Partai Syarekat Islam Indonesia 1905 bukan peserta pada Pemilu 2004, secara otomatis dua partai ini juga tidak dapat menjadi peserta Pemilu 2009. Walaupun SI tidak lagi sebagai partai politik peserta Pemilu, adanya konsistensi



dari beberapa tokohnya, Syarekat Islam masih tetap eksis sampai saat ini dan terus berusaha memberikan sumbangsihnya untuk bangsa dan Negara sebagai organisasi kemasyarakatan.

G. Penutup

Sarekat Dagang Islam (1905) yang didirikan H. Samanhudi merupakan cikal bakal Sarekat Islam (1912) yang pada tahun 1923 berubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) dan tahun 1929 berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Sarekat Islam merupakan pelopor organisasi politik pertama yang bercita-cita mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini telah melahirkan banyak tokoh dari organisasi-organisasi PNI, PKI, Masyumi dan lain-lain yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Didirikannya SDI pada awalnya adalah untuk menjadi wadah bagi pedagang-pedagang batik (muslim) agar dapat bersaing dan dapat membendung pedagang-pedagang Tionghoa di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, organisasi ini tidak hanya bergerak di bidang ekonomi dan agama namun lebih luas lagi yaitu bidang politik, sosial dan kebudayaan. SDI/SI menjadikan agama Islam sebagai pengikat umat karena saat itu di Indonesia belum mengenal kata nasionalisme maupun kebangsaan. Islam menjadi pembeda antara pribumi dan bangsa asing.

Syarikat Islam masih terus berlanjut, pada masa Orde Baru partai-partai Islam : NU, PSII, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) diharuskan fusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dengan fusinya PSII ke dalam PPP menyebabkan turunnya peran politik partai ini dan selanjutnya mengikuti NU menyatakan diri sebagai organisasi massa. Pada era Reformasi ini ada sebagian tokoh SI yang berusaha mendirikan PSII sebagai partai politik kembali, tetapi tidak berhasil menembus *electoral threshold* sehingga tidak berhasil memiliki wakil di lembaga legislatif maupun yudikatif. Pada masa Reformasi, SI terus berkiprah untuk memajukan bangsa dan negara sebagai organisasi sosial kemasyarakatan.

Sebagai organisasi yang tidak terbatas pada etnis tertentu, kelas tertentu dan berskala luas membuat SI cepat besar dan meluas keanggotaannya. Akan tetapi, kebesarannya tidak dapat dipertahankan. Perbedaan paham ideologi, persaingan pengaruh antar tokoh-tokoh SI, perbedaan kepentingan atau karena masalah pribadi menjadi pemicu konflik dan perpecahan di tubuh SI. Realitas ini menjadi sebab surutnya SI sebagai organisasi maupun partai politik yang relatif besar sehingga mengalami penurunan terus menerus.

Daftar Pustaka

- Achdian, Andi, "Sarekat Islam sebagai Kelanjutan Boedi Oetomo: H.O.S. Tjokroaminoto dan Awal Kebangkitan Nasional di Kota Surabaya, 1908 – 1912" dalam *Jurnal Sejarah* Vol. 1(1), 2017.
- Amin, Masyhur, *Syarekat Islam Obor Kebangkitan Nasional 1905-1942*. Yogyakarta: Al Amin Press, 1996.
- Amelz, H. O. S. *Tjokroaminoto. Hidup dan Perjuangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
- Anshori, Endang Saifudin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional*, Bandung: Pustaka Perpustakaan Salman ITB., 1981.
- Anshoriy Ch, M. Nasruddin, *Bangsa Gagal: Mencari Identitas Kebangsaan*, Yogyakarta : LKiS, 2008.
- Djaelani, Abdul Qadir, *Peran Ulama dan Santri dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1994.
- Gonggong, Anhar, *HOS Cokroaminoto*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Pembinaan Sekolah Dasar, 1985.
- Hanifah, Abu, *Renungan Perjuangan Bangsa Dulu dan Sekarang*, Jakarta: Idayu, 1978.
- Hidayat, Asep Ahmad, *Studi Islam di Asia Tenggara*. Bandung: Pustaka Rahmat, 2014.



- Inglison, J. *Jalan Ke Pengasingan, Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Kamaruzzaman, "Dinamika Politik Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Jami'ah*, VoL 41, No. 1, 2003 / 1424 H.
- Karim, Rusli, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta : CV Rajawali, 1983.
- Maftuhin, Sumarjono, Nurul Umamah, "The Movement Of Sarekat Islam's Politics In Struggling National Independence In 1918-1945", *Jurnal Historica*, ISSN No. 2252-4673, Volume. 1, Issue. 2, 2017.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'I, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Prasetyo, Johan, *Pahlawan-pahlawan Bangsa yang Terlupakan*, Yogyakarta: Saufa, 2014.
- Pringgodigdo, AA, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Robert, Van Niel, *Munculnya Elite Modern Indonesia*, Terj. Zahra Deliar, Noer Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1984.
- Romli, Lili, *Islam Yes, Partai Islam Yes, Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sitorus, L.M, *Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Rakyat 1951.
- Shiraishi, Takashi. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Grafiti Press, 1997.
- Subekti, Valina Singka, *Partai Syarikat Islam Indonesia Kontestasi Politik hingga Konflik Kekuasaan Elite*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Suryanegara, Ahmad Mansur, *Api Sejarah*, jilid I. Bandung: Grafindo Salamadani, 2009.
- Tim Museum Kebangkitan Nasional, *H.O.S. Tjokroaminoto Penyemai Pergerakan Kebangsaan dan Kemerdekaan* (Jakarta: Museum

Kebangkitan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), 2014.

Usman, Ismail, "Sarekat Islam (SI) Gerakan Pembaruan Politik Islam", dalam *Jurnal Potret*, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam, Vol. 21 No.1, Januari-Juni 2017.

Wasino. *Wong Jawa Dan Wong Cina*. Semarang: Unnes Press, 2006.

Winarni, Retno dan Widuatie ,Mrr. Ratna Endang, Konflik Politik dalam Pergerakan Syarekat Islam 1926, dalam *Literasi*, Vol. 5, No. 2, Desember 2015.

Wiradipraja, Saefullah, 2005, *Satu Abad Dinamika Perjuangan Sarekat Islam*, Jakarta: Dewan Pimpinan Wilayah Sarekat Islam Jawa Barat.

Yasmin, 2009, "Syarikat Islam dalam Pergerakan Nasional Indonesia (1912-1927) dalam *Jurnal Sejarah Lontar*, Vol.6 No.1, Januari-Juni 2009.